



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661  
(Hunting)  
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 339/Bua-4/PL-02/07/2021 Jakarta, 15 Juli 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Monitoring Pelaksanaan Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2021.

Kepada Yth.  
Daftar Terlampir  
di-  
tempat

Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 562/SEK/PL.02/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penyampaian Daftar Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2021 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan RI bersama Kementerian ATR/BPN RI dengan DIPA Kementerian ATR/BPN RI dan Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI Nomor 106/BUA.4/PL.07/3/2-21 tanggal 10 Maret 2021 perihal Penyampaian Daftar Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN Berupa Tanah TA 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal antara lain :

1. Terhadap satuan kerja yang dokumen kepemilikan tanahnya sudah berupa **Sertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI** dengan luas tanah tercantum yang masih sama dengan dokumen sebelumnya atau sudah berubah dengan luas tanah tercantum yang baru sesuai dengan yang SHP diterbitkan tersebut agar dapat melaporkan dokumen kepemilikan tanahnya kepada Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI berikut **mengkinikan** data terbaru (karena SHP pecah sertipikat/ hasil pengukuran ulang petugas BPN/ sertipikat naik status dari SHM menjadi SHP/ Penggantian format SHP yang baru) pada luasan tanah KIB di SIMAK BMN, dokumen tanah SIMAN, daftar tanah SIMANTAP dan dokumen tanah SIPERMARI.
2. Terhadap satuan kerja yang masuk dalam program Pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 saat ini masih berjalan dapat melaporkan secara tertulis kepada Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI perihal perkembangan terkini pelaksanaan program Pensertipikatan BMN berupa tanah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan/atau Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat apakah mengalami kendala atau hal lainnya;
3. Kepada satuan kerja tingkat banding yang menjadi Koordinator Wilayah agar dapat turut serta melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Aset BMN berupa tanah dengan berkoordinasi kepada satuan kerja dan mitra KPKNL satuan kerja dan/atau kantor pertanahan BPN/ATR setempat berdasarkan bidang tanah yang masuk target sertifikasi Kementerian Keuangan RI serta mengusulkan bidang tanah lainnya yang belum bersertipikat pada mitra KPKNL satuan kerja dan/atau kantor pertanahan BPN/ATR setempat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

  
**Kepala Biro Perlengkapan**  
**ROSFIANA, S.H., M.H**  
**NIP. 19640612 198703 2 003**

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI;
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat;
6. Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Koordinator Wilayah Jawa Timur;
7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Koordinator Wilayah Sumatera Utara;
8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah Riau;
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah;
10. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan;
11. Sekretaris Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
12. Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar selaku Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat;
13. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Koordinator Wilayah Maluku;
14. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku Koordinator Wilayah Bengkulu;
15. Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI

Nomor :

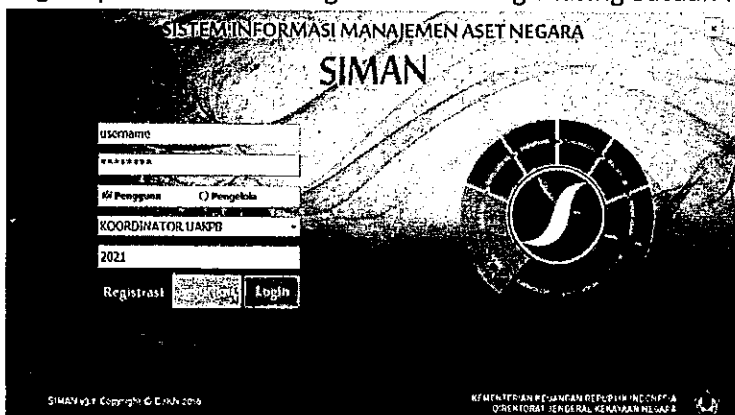
Tanggal :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon;
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur;
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Garut;
4. Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi;
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Bondowoso;
6. Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
7. Sekretaris Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;
8. Sekretaris Pengadilan Negeri Nanga Bulik;
9. Sekretaris Pengadilan Agama Kotabaru;
10. Sekretaris Pengadilan Negeri Batulicin;
11. Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta;
12. Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa;
13. Sekretaris Pengadilan Negeri Watampone;
14. Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon;
15. Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu.



## PETUNJUK *UPDATE* DATA DOKUMEN SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH PADA MASTER ASET SIMAN

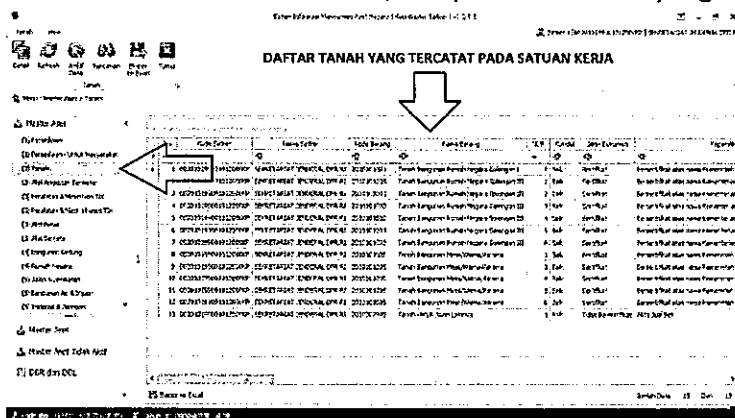
1. Login Aplikasi SIMAN dengan user masing-masing Satuan Kerja



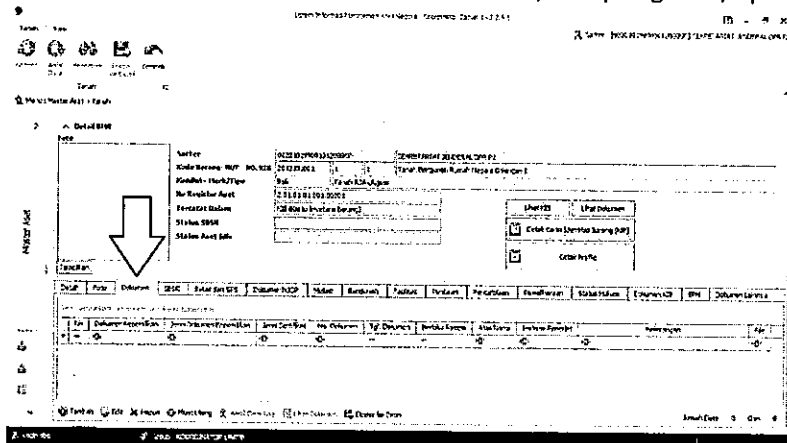
2. Pilih Plug-In Master Aset



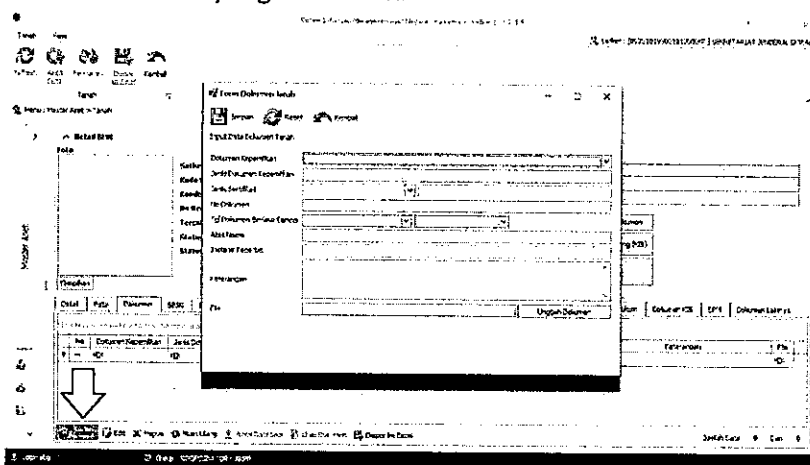
3. Klik Data Master Aset "Tanah", lalu pilih data tanah yang akan di-update



4. Pilih Tab “Dokumen” Untuk masuk ke tampilan pengisian/update Dokumen tanah



5. Pilih “Tambah” untuk mengisi data dokumen tanah, atau “Edit” untuk meng-update data dokumen tanah yang sudah ada



6. Pengisian *field* “Dokumen Kepemilikan”, diisi sesuai dokumen kepemilikan tanah terakhir yang ada, dengan kategori dokumen sebagai berikut :
  - a. **Bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q K/L (Sertipikat)**  
untuk tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga yang menguasai
  - b. **Bersertipikat atas nama K/L (Sertipikat)**  
untuk tanah yang sudah bersertipikat namun masih atas nama Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga c.q. Satuan Kerja, maupun atas nama Satuan Kerja
  - c. **Bersertipikat atas nama pihak ketiga (Sertipikat)**  
untuk tanah yang sudah bersertipikat namun masih atas nama pihak lain
  - d. **Surat Pelepasan Hak (Tidak Bersertipikat)**
  - e. **Akta Jual Beli (Tidak Bersertipikat)**
  - f. **Dokumen Pengadaan Tanah (Tidak Bersertipikat)**
  - g. **Petok D/Girik/Letter C (Tidak Bersertipikat)**

- h. Keputusan/Peraturan Desa (Tidak Bersertipikat)**
  - i. Bukti Kepemilikan Lainnya (Tidak Bersertipikat)**  
untuk tanah belum bersertipikat dengan dokumen selain poin d s.d h sebagaimana disebut di atas.
  - j. Tidak Ada Dokumen Kepemilikan**  
untuk tanah tanpa dokumen
7. Pengisian *field* "Jenis Dokumen Kepemilikan" otomatis terisi setelah *field* "Dokumen Kepemilikan" pada poin 6 telah terisi.
  8. *Field* "Jenis Sertipikat" hanya dapat diisi bila isian *field* "Dokumen Kepemilikan" adalah salah satu dari Bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L, Bersertipikat atas nama K/L, ataupun Bersertipikat atas nama Pihak Ketiga. Adapun Jenis Sertipikat yang dapat dipilih sebagai berikut :
    - a. Sertipikat Hak Pakai (SHP)**
    - b. Sertipikat Hak Milik (SHM)**
    - c. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)**
    - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)**
  9. "Nomor Dokumen" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan Nomor Sertipikat dari tanah dimaksud. Nomor dokumen tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi di *field* "Keterangan".
  10. "Tanggal Dokumen-Berlaku Sampai" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan tanggal penerbitan Sertipikat, dan tanggal masa berlakunya (apabila ada). Untuk tanggal dokumen dan tanggal masa berlakunya (apabila ada) tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi di *field* "Keterangan".
  11. "Atas Nama" diisi dengan atas nama pemegang hak dari dokumen yang ada.
  12. "Instansi Penerbit" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan Kantor Pertanahan penerbit Sertipikat dimaksud. Untuk instansi penerbit tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi di *field* "Keterangan".
  13. "Keterangan" dapat diisi dengan keterangan atau informasi lain yang diperlukan terkait tanah.
  14. "Unggah Dokumen" untuk mengunggah file *softcopy* dari Dokumen Tanah.
  15. Klik "Simpan" apabila data-data sudah terisi/terupdate.

-TERIMA KASIH-

**REKAPITULASI JUMLAH BIDANG DAFTAR NOMINATIF  
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN BMN BERUPA TANAH TA 2021  
PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA**

No	Wilayah	KPKNL	Kantor Pendaftaran BPN/ATR	Kode Satker	Nama Satker	Kode BMN	Uraian BMN	NUP	Kode SIMANTAP	Luas (m <sup>2</sup> )	Kategori	Letak/Posisi/Alamat			Alas Hak	Koordinat Sentral Lokasi Aset		Keterangan	
												Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/kota		X (meter)	Y (meter)		
1	Jawa Barat	Bogor	Kab. Cianjur	005010200097666000	Pengadilan Negeri Cianjur	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	6	3H60NDIAM	300	I								
2	Jawa Barat	Tasikmalaya	Kab. Garut	005010200097542000	Pengadilan Negeri Garut	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	6	3SA0VY1XQ	546	I	Pamoyanan	Cianjur	Cianjur	Akta Jual Beli	107,1383031	6,82339509		
3	Jawa Timur	Jember	Kab. Banyuwangi	005010400401369000	Pengadilan Agama Banyuwangi	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3GU0LPISG	1.600	I	Jl. A. Yani No.106 Banyuwangi		Banyuwangi	Akta Jual Beli				Tanah Rumah Dinas
4	Jawa Timur	Jember	Kab. Bondowoso	005010400098192000	Pengadilan Negeri Bondowoso	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	4N0NBK1J	350	I	Jalan Jend. Soepto Yudodihurjo No. 08		Bondowoso	Kuitansi				Data Dit. BMN Yang Telah Diverifikasi
5	Sumatera Utara	Kisaran	Kab. Labuhan Batu	005010700098675000	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	XZ15BY5	2.000	I	Jl. Sei Tawar No. 56		Rantau Utara	Surat Pernyataan				
6	Sumatera Utara	Kisaran	Kab. Labuhan Batu	005010700098675000	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3	5BY32ZWW	600	I	Jl. Cut Nyak Dhien No.32		Rantau Utara	Surat Pernyataan				
7	Riau	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	005010900662990000	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	SIZ143CX1	20.000	I	DESA RAMBAH TENGAH UTARA	RAMBAH	Rokan Hulu		100,10,56,31	0,32,31,43		
8	Riau	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	005010900662990000	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	SIZ13WYZZ	9.878	I	DESA RAMBAH TENGAH HILIR	RAMBAH	Rokan Hulu	Surat Keterangan	100,11,28,6	0,33,7,25		
12	Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	Lamandau	005011400401919000	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	STF0Y659M	1.421	I	Tapin Bini	Lamandau	Lamandau		111,31509	-1,896235		Carry over 2020
9	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kab. Kotabaru	005011500307122000	Pengadilan Agama Kotabaru	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	belum tercatat	7.604	I	STAGEN	PULAU LAUT UTARA	Kotabaru					Carry Over 2020
10	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	005011500670206000	Pengadilan Negeri Batulicin	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	4L00R3YZE	11.194	I	Gunung Antasari	Simpong Empat	Tanah Bumbu	BAST Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	-3,404352	115,991749		
11	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	005011500670206000	Pengadilan Negeri Batulicin	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	XZ11BY5	5.986	I	Gunung Antasari	Simpong Empat	Tanah Bumbu	BAST Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	-3,406048	115,99179		
13	Kalimantan Timur	Bontang	Kab. Kutai Timur	005011600662986000	Pengadilan Negeri Sangatta	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1		700	3	Jalan Sockarno Hatta	Singa Gembara	Sangatta Utara	hibah Pernda				
14	Sulawesi Selatan	Makassar	Gowa	005011900099439000	Pengadilan Negeri Sungguminasa	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2		540	1	HOS. COKROAMINOTO NO.4		Gowa	Surat Keterangan				
15	Sulawesi Selatan	Makassar	Gowa	005011900099439000	Pengadilan Negeri Sungguminasa	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	7		633	1	ANDI TONRO		Gowa	Surat Keterangan				
16	Sulawesi Selatan	Pare Pare	Bone	005011900099532000	Pengadilan Negeri Watampone	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3	5370VZKTA	276	1			Bone	Hibah				
17	Maluku	Ambon	Maluku Tengah	005012100099706000	Pengadilan Negeri Ambon	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	JHS0REF2F	1.000	1	JLN Dr. MOHAMMAD HATTA	BANDA	Maluku Tengah	Surat Keterangan				Tidak Sengketa
18	Maluku	Ambon	Kota Ambon	005012100099691000	Pengadilan Tinggi Ambon		1 (SATU) UNIT RUMAH DINAS DI ATAS TANAG DINI		3HY0TPIIV	400	1	Jl. DR. MALATHOLLO	NUSANTWE	Ambon	BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI HUKUM DAN HAM SERTA SURAT AKTA JUAL BELI				Tidak Sengketa
19	Bengkulu	Bengkulu	Kota Bengkulu	005012600400110000	Pengadilan Negeri Bengkulu	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	5L20QWJNG	2.500	1	Jl. S. Parman No.05 Padang Lati Kota Bengkulu		Bengkulu	BAST				

Data Sumber : Daftar Nominatif Sertifikasi BMN Kementerian Keuangan RI untuk bidang tanah Mahkamah Agung RI yang dilah.